

PELAKSANAAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) VICO INDONESIA BIDANG PENINGKATAN KEMAMPUAN LOKAL DI KECAMATAN MUARA JAWA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Darul Asmawan¹, Anwar Alaydrus², Budiman³

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara dengan menggali sumber data dari VICO Indonesia selaku perusahaan yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) dan masyarakat setempat selaku penerima program CSR. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme Pelaksanaan CSR VICO Indonesia Bidang Peningkatan Kemampuan Lokal di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara. Fokus penelitian ini adalah program Pengembangan Tanaman Karet, Pelatihan Menjahit, dan Penambahan Fasilitas di Gedung UKM Center. Jenis penelitian bersifat deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data memakai pola penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan: mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program CSR VICO Indonesia Bidang Peningkatan Kemampuan Lokal di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara telah terlaksana dengan cukup baik. Pelaksanaan program dapat terlihat dari program Pengembangan Tanaman Karet, Pelatihan Menjahit, serta Penambahan Fasilitas di Gedung UKM Center yang semuanya telah dijalankan. Namun, masih perlu diadakan evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksanaan ketiga program tersebut.

Kata Kunci: Peningkatan, kemampuan, lokal, VICO Indonesia, program, CSR.

Pendahuluan

Kekayaan SDA di Indonesia adalah anugerah terbesar yang dititipkan oleh Allah SWT, Sang Maha Pencipta. Pemanfaatan secara ideal juga telah dikonseptkan secara matang sejak awal Indonesia merdeka. Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: darulasmawan66@gmail.com

² Dosen Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun saat aturan tersebut sudah diberlakukan sejak puluhan tahun lalu, apakah saat ini potensi SDA telah dikelola secara baik oleh negara untuk mensejahterakan masyarakat?

Pemerintah pusat harusnya mampu mengeksplorasi potensi SDA di dalam perut bumi Indonesia melalui perusahaan berbasis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar dampak positifnya bisa dirasakan secara maksimal oleh negara. Namun realitanya, hal itu belum bisa diimplementasi secara maksimal. Izin yang diberikan pemerintah dalam mengeksplorasi potensi tambang dan migas bagi banyak perusahaan asing ataupun swasta memberi gambaran bahwa pemerintah—sebagai sang pengelola negara—masih kurang mampu mengelola potensi SDA-nya sendiri. Banyak hasil bumi yang harusnya dikuasai negara, justru luput dari penguasaan negara secara maksimal. Dan kondisi sekarang, potensi tambang serta migas sebagian besar dikuasai perusahaan asing dan swasta.

Menggeliatnya eksplorasi tambang dan migas oleh perusahaan asing dan swasta di Indonesia memang kurang baik, tapi tidak seluruhnya berunsur tidak baik. Jika dipandang dari sisi positif, kedua belah pihak turut mambantu kurang maksimalnya peran pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat. Pemerintah pusat hingga daerah masih belum mampu menyeimbangkan rasio antara minimnya ketersediaan lapangan kerja dan banyaknya masyarakat yang mencari kerja. Ketimpangan rasio itu bahkan masih bisa dirasakan hingga sekarang. Pemerintah masih tak mampu menjamin ketersediaan lapangan kerja yang cukup bagi masyarakat. Inilah salah satu pekerjaan rumah pemerintah yang belum terselesaikan.

Perusahaan tambang atau migas yang bertanggung jawab pasti sadar bahwa mereka harus menunjukkan kepedulian melalui pelaksanaan berbagai program sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) di sekitar daerah operasi perusahaan. Program CSR akan membangun kemandirian masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat, bantuan permodalan, maupun penyediaan beragam fasilitas umum. Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat dapat mandiri serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Selain itu, CSR adalah salah satu solusi untuk membantu pemerintah pusat maupun daerah guna mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di luar pembiayaan APBN ataupun APBD.

Satu dari banyak perusahaan asing yang melaksanakan program CSR adalah Virginia Indonesia Company (VICO) Indonesia. Kontribusi CSR VICO Indonesia dilakukan untuk membantu kebutuhan masyarakat yang dilandasi oleh Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di Provinsi Kaltim, pusat operasi VICO Indonesia ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Lebih khusus, daerah eksplorasi ada di enam kecamatan: Muara Badak, Marangkayu, Anggana, Sanga-sanga, Samboja, serta lokasi penelitian penulis: Kecamatan Muara Jawa.

Untuk memaksimalkan program CSR-nya, VICO Indonesia fokus pada empat program pemberdayaan, yakni Pendidikan, Lingkungan, Kesehatan, dan Peningkatan Kemampuan Lokal. Namun, tanpa niat mengesampingkan ketiga program lain, program Peningkatan Kemampuan Lokal sangat penting untuk ditingkatkan. Mulai dari memperbesar porsi anggaran, implementasi terhadap program, hingga evaluasi. Jika program CSR bidang Peningkatan Kemampuan Lokal dapat ditingkatkan dengan baik, maka pemberdayaan masyarakat dari berbagai lini usaha bisa terus didorong maju dan berkembang. Memerhatikan besarnya dampak positif yang bisa dihasilkan dengan adanya pelaksanaan program CSR ini, terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat.

Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik (*public policy*) oleh Dye (1992:2) diartikan sebagai “*Whatever governments choose to do or not to do.*” (Kebijakan publik adalah apa pun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Pendapat senada dikemukakan oleh Edward III dan Sharkansky dalam Islamy (1984:18), yang menyebut kebijakan publik adalah “*what government say and do, or not to do. It is the goals or purpose of government programs.*” (Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan, dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah).

Pengertian kebijakan menurut Kartasasmita (1997:142) merupakan upaya untuk mengartikan (1) apa yang dilakukan (atau tidak dilakukan) oleh pemerintah mengenai suatu masalah, (2) apa yang menyebabkan atau yang memengaruhi, dan (3) ada pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut.

Friedrich dalam Wahab (1991:13) mengartikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan dan mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Menurut Bambang Rudito dan Melia Famiola (2013:1), “CSR pada dasarnya adalah sebuah keputusan bagi korporat untuk dapat berinteraksi dengan komunitas lokal sebagai bentuk masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan korporat untuk beradaptasi dan guna mendapatkan keuntungan sosial dari hubungannya dengan komunitas lokal, sebuah keuntungan sosial berupa kepercayaan (*trust*).

Menurut Lutfi Destiano Solihin (2008:2), “Tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan adalah memiliki suatu

tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam aspek operasional perusahaan.”

Menurut Wibisono (2007:7), “*Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya.”

Pentingnya CSR Bagi Perusahaan

Terdapat tiga alasan penting mengapa perusahaan harus melaksanakan CSR yang benar, (Wibisono, 2007:142).

1. Karena perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat.
2. Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme. Untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat, setidaknya izin untuk melakukan operasi yang sifatnya kultural. Wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan citra dan performa perusahaan.
3. Kegiatan CSR merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindarkan konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dari dampak operasional perusahaan atau akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan.

Dasar Hukum CSR

Program CSR juga sudah mulai bermunculan di Indonesia seiring dengan telah sahnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adapun isi undang-undang di atas yang membahas perihal CSR yaitu di Pasal 74 dengan bunyi:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pemberdayaan

Menurut Sumaryadi (2005:163), “Pemberdayaan merupakan proses sebagai akibat dari individu yang mempunyai kemandirian, motivasi, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dalam cara-cara yang memberikannya rasa kepemilikan dan Kepenuhan dalam mencapai tujuan bersama.”

Menurut Djohani dalam Oos M. Anwas (2013:49), “Pemberdayaan merupakan suatu proses untuk memberikan kekuasaan kepada pihak yang lemah, dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang terlalu berkuasa sehingga terjadi keseimbangan.”

Menurut Rappaport dalam Oos M. Anwas (2013:49), “Pemberdayaan adalah suatu cara dengan rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.”

Makna Pemberdayaan

Menurut Priyono dan Pranarka di dalam Bambang Rudito (2003:132), makna pemberdayaan mengandung dua kecenderungan:

1. Kecenderungan primer, yaitu pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya.
2. Kecenderungan sekunder, yaitu pemberdayaan yang menekankan kepada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2009:271), “Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.”

Menurut Koentjaningrat (2001:17), “Masyarakat adalah suatu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi melalui suatu sistem adat istiadat yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu identitas bersama.”

Menurut Mac Iver dan Page dalam Soekanto (2000:26), “Masyarakat merupakan suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok dan pengolahan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia.”

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini berusaha memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklarifikasi, dan menganalisis variable yang diteliti. Penelitian ini tidak ditujukan untuk menguji hipotesis, melainkan hanya untuk mendeskripsikan informasi sesuai dengan hasil penelitian.

Fokus Penelitian

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) VICO Indonesia bidang Peningkatan Kemampuan Lokal tahun 2014-2016 di Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara yang meliputi:

1. Program Pengembangan Tanaman Karet
2. Program Pelatihan Menjahit
3. Program Penambahan Fasilitas di Gedung UKM Center

Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber primer, yaitu sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data.
2. Sumber sekunder, yaitu sumber data tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)
2. Penelitian lapangan
 - a) Observasi
 - b) Wawancara
 - c) Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Menurut Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman (2007:15-20), dalam penelitian kualitatif analisis terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Hasil Penelitian

Pelaksanaan Program CSR VICO Indonesia

Komitmen menjalankan program CSR ke masyarakat sekitar senantiasa diwujudkan meskipun industri minyak dan gas kerap mengalami pasang surut. Pada 2015 misalnya, adalah tahun yang penuh tantangan bagi industri migas seiring turunnya harga minyak dunia. Namun VICO Indonesia masih berupaya melanjutkan program pengembangan masyarakat secara efektif dan efisien. Keempat sektor (Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, dan Peningkatan Kemampuan Lokal) yang pakem tersebut tetap menjadi fokus kegiatan VICO Indonesia sejak 2014, tetap dapat dijalankan tahun-tahun selanjutnya.

Khusus program Peningkatan Kemampuan Lokal, VICO Indonesia turut hadir menunjang kegiatan ekonomi masyarakat disekitar wilayah operasi. Selama 2015, beragam upaya memaksimalkan potensi itu ditempuh melalui beberapa program seperti pembangunan Gedung UKM Center, promosi dan pengembangan UKM, serta pengembangan kelompok tani.

Program di atas dapat berjalan lancar karena dari proses penyusunan hingga pelaksanaan program, pihak perusahaan turut melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi penuh. VICO Indonesia pun terus berupaya melakukan koordinasi ke semua pihak termasuk pemerintah setempat agar berbagai program-program yang telah dirumuskan bersama, bisa berjalan dan memberi dampak besar bagi masyarakat.

Kerja sama antara VICO Indonesia dengan pemerintah dan masyarakat setempat diharapkan dapat menjaga kesinambungan program yang telah dibuat bersama. Pendekatan ini juga diharapkan dapat membuat berbagai program lainnya dapat berjalan secara berkesinambungan dan dapat menjunjung tujuan jangka panjang yaitu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri.

Mekanisme Merancang dan Melaksanakan Program

Dalam proses perencanaan dan perumusan program, VICO Indonesia menetapkan dua pola: *bottom up* dan *top down*. Pihak perusahaan masih dapat menggunakan otoritasnya selaku pemilik anggaran untuk merumuskan usulan program CSR-nya ke masyarakat (*top down*). Namun tetap memberi peluang bagi masyarakat mengusulkan program yang mereka butuhkan ke VICO Indonesia dan diakomodir dalam rancangan program CSR versi *bottom up*.

Program *top down* pun, meski dirumuskan oleh pihak VICO Indonesia, namun tetap memastikan bahwa dampak program tersebut tetap harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat. Program yang sifatnya *bottom up* diusulkan masyarakat melalui berbagai lapisan, baik masyarakat hingga pemerintah setempat. Muara dari kebijakan yang bersifat *bottom up* ini juga dimanfaatkan para *stakeholder* untuk menyampaikan usulan-usulan program yang dibutuhkan masyarakat se-Kecamatan Muara Jawa ke VICO Indonesia.

Kedua program tersebut disinergikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) khusus antara VICO Indonesia dan *stakeholder*

terkait (masyarakat dan pemerintah) pada tingkat kecamatan. Musrembang itu dilaksanakan rutin setiap tahun dan dihadiri tiap *stakeholder*.

Khusus program yang bersifat *bottom up*, penentuan program mana yang layak untuk dibantu dalam anggaran CSR tidak ditentukan sepihak oleh VICO Indonesia, tapi pihak pemerintah kecamatan-lah yang memiliki kuasa penuh terhadap itu. Pemerintah kecamatan akan membuat skala prioritas dari usulan masing-masing kelurahan, dan penyepakatan terhadap program tersebut harus disesuaikan dengan alokasi anggaran CSR yang diberikan VICO Indonesia.

Program yang bersifat *top down pun*, meski dirumuskan oleh VICO Indonesia, namun pihak yang paling berwenang menentukan berhak tidaknya program tersebut berjalan di Kecamatan Muara Jawa adalah dari pemerintah kecamatan dalam hal ini camat Kecamatan Muara Jawa. Program apa kiranya yang paling prioritas, maka program tersebutlah yang akan dilaksanakan oleh VICO Indonesia melalui program CSR-nya.

Bentuk Pelaksanaan Program CSR VICO Indonesia Bidang Peningkatan Kemampuan Lokal

Dalam implementasinya, bisa dibilang program CSR bidang Peningkatan Kemampuan Lokal telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari terlaksananya program di bidang ini dalam kurun tiga tahun ke belakang: 2014, 2015, serta 2016. Khusus untuk bidang Peningkatan Kemampuan Lokal ini, VICO Indonesia menggagas program tersebut untuk mendorong adanya perubahan perilaku dan *main set* berpikir segenap elemen masyarakat dalam menunjang kegiatan ekonomi.

Perubahan perilaku dimaksudkan agar ekonomi masyarakat kelak bisa mandiri meski di masa mendatang perusahaan tidak lagi beroperasi di area Kecamatan Muara Jawa. Kunci sukses dari berjalannya program ini terletak pada sinergisitas antara program Peningkatan Kemampuan Lokal sebagai penunjang dan masyarakat yang menerima bantuan tersebut sebagai objek yang menerima manfaat dari program. Karena berkaca dari pengalaman yang telah terjadi beberapa tahun belakang, masalah terbesar bukan datang dari programnya, tapi belum dewasanya pola pikir masyarakatnya.

1. Program Pengembangan Tanaman Karet

Tahun 2014, VICO Indonesia tetap menjalankan program CSR-nya. Salah satu pihak yang mendapatkan bantuan program CSR adalah pihak Kelompok Tani Gunung Pelita. Hanya beberapa bulan pasca ajuan disepakati dalam musrenbang, VICO Indonesia merealisasikan permohonan ajuan pihak kelompok tani tersebut. Bentuk bantuan yang diberikan berupa bibit karet sebanyak 2.500 buah, 25 liter obat rumput, dan lima unit mesin semprot rumput.

Kondisi tanaman karet tersebut mulai tahun 2014 hingga 2018 telah tertanam dan masih dalam tahap perawatan, belum masuk masa produksi. Secara matematis, hasil panen baru bisa dinikmati pihak kelompok tani sekitar tahun 2020 kelak. Hasilnya memang belum memberi dampak langsung, tapi pada masa mendatang, peningkatan ekonomi para anggota kelompok akan mulai bisa terpantau.

Berkat bantuan tersebut, pihak kelompok tani turut tertolong dengan adanya program bantuan bibit karet tersebut. Jumlah bantuan pun sesuai dengan pengajuan proposal yang disodorkan dalam ajukan awal. Kelompok tani yang berlokasi di Kelurahan Muara Jawa Ilir ini dulunya biasa berkebun karet dengan anggaran swadaya antar masing-masing anggota. Tapi didapatkannya bantuan bibit tersebut membuat pihak kelompok tani dapat menanam dan memproduksi karet, sembari pula menghemat anggaran keuangan kelompok dan perorangan.

Bantuan Pengembangan Tanaman Karet itu menggambarkan pihak perusahaan telah turut berupaya membantu pemerintah tingkat kecamatan atau kelurahan dalam upaya menyejahterakan masyarakat sekitar. Kelak, bantuan Pengembangan Tanaman Karet akan dinikmati masyarakat yang ujungnya akan menunjang pertumbuhan ekonomi para anggota kelompok. Pihak kelompok tani juga menaruh harapan agar Kelompok Tani Gunung Pelita kembali mendapat perhatian dalam bentuk bantuan lagi.

Satu kelemahan dari program ini ialah tak adanya lagi *follow up* dan komunikasi pasca pemberian bantuan. Komunikasi terakhir antara pihak VICO Indonesia dan pihak kelompok tani hanya dilakukan saat prosesi serah terima barang bantuan dan dokumentasi saja di tahun 2014. Dan dari momen itu sampai sekarang, tak ada jalinan komunikasi antar kedua belah pihak.

2. *Program Pelatihan Menjahit*

Tahun 2015, lewat sistem *bottom up*, salah satu program yang *fixed* dibantu VICO Indonesia lewat program CSR-nya yakni program pelatihan menjahit. Program yang muncul dari Kelurahan Muara Jawa Ilir ini diinisiasi oleh ibu-ibu PKK di kelurahan tersebut, dan peserta pelatihan juga dipilih *segmented* hanya bagi ibu-ibu di kelurahan itu.

Pasca disepakati dalam musrenbang untuk dibantu, program itu akhirnya mulai terlaksana pada tanggal 2 November 2015 sampai 6 Januari 2016 (sekitar dua bulan atau 30 pertemuan) di tempat Kelompok Menjahit FATMA, salah satu kelompok menjahit di Kelurahan Muara Jawa Ilir.

Di lokasi pelatihan tersebut sebenarnya hanya memiliki 10 mesin jahit, sedangkan peserta pelatihan menjahit kesemuanya adalah ibu-ibu yang terdiri dari 14 orang peserta. Untuk mengantisipasi jumlah mesin jahit yang sebenarnya kurang, pembagian kinerja pun diterapkan dalam pelatihan menjahit tersebut. Dalam satu kali pertemuan, ditetapkan siapa yang

menggunakan mesin jahit, mana yang bertugas di mesin obras, dan mana yang bertugas sebagai pemotong kain.

Pada setiap pertemuan, selalu ada yang berganti tugas di antara tiga pekerjaan tersebut. Sehingga meski sebenarnya mesin jahit tersebut kurang, namun semua peserta tetap mendapatkan pelatihan menjahit intensif. Tentu tiap pertemuan, tiap peserta diberikan tugas yang bergantian.

Selain pelatihan menjahit, VICO Indonesia turut pula memberi bantuan tiga unit mesin jahit dan satu mesin obras. Empat unit mesin tersebut pun langsung dipergunakan para ibu-ibu peserta pelatihan bersama 10 mesin jahit lainnya yang sudah ada di lokasi Kelompok Menjahit FATMA.

Saat pelatihan, ibu-ibu diberikan pengajaran seputar teknik-teknik dasar dalam menjahit. Beberapa di antaranya seperti pelajaran terkait teknik mengukur tubuh pemesan busana, teknik perangkaian pola pembuatan busana, dan teknik penempatan kain yang benar sebelum dipotong. Setelahnya, beberapa hal penting lain seperti teknik menjahit busana dengan mesin jahit, teknik pengepresan, hingga teknik penyelesaian akhir (*finishing*) pembuatan busana menjadi menu latihan yang diajarkan dalam kurun 30 kali pertemuan.

Program tersebut dipandang positif oleh ibu-ibu di daerah tersebut. Program tersebut telah berjalan dengan bagus dan efektif untuk memberi keterampilan dasar dalam menjahit. Walau dalam perjalanannya kini, tak adanya *follow up* dari VICO Indonesia pasca pelatihan menjahit membuat para peserta pelatihan mayoritas tidak menjadikan ilmu menjahit tersebut sebagai tindak lanjut untuk menambah pemasukan ekonomi. Perlu *follow up* konkret agar program yang sebenarnya bagus tersebut tak berhenti pada satu program tanpa *follow up*.

3. Program Penambahan Fasilitas di Gedung UKM Center

Tahun 2016, pihak VICO Indonesia melaksanakan suatu program yakni “Penambahan Fasilitas di Gedung UKM Center” guna memberi fasilitas tambahan bagi pegiat UKM yang ada di Kecamatan Muara Jawa. Program ini merupakan *follow up* pasca pembangunan Gedung UKM Center yang juga dilaksanakan lewat program CSR VICO Indonesia telah rampung terbangun tahun 2015 silam.

Ternyata, program Penambahan Fasilitas di Gedung UKM Center tak lepas dari evaluasi yang diberikan para pegiat UKM yang telah menempati Gedung UKM Center. Pasca gedung tersebut dioperasikan, pegiat UKM lebih banyak menggunakan halaman depan Gedung UKM Center sebagai sarana berkumpul dan berjualan makanan cepat saji, sedang di dalam gedung digunakan untuk penjualan produk olahan dalam kemasan.

Namun seiring waktu berjalan, salah satu keluhan yang muncul ialah penjualan makanan cepat saji di depan halaman Gedung UKM Center yang kerap terganggu jika musim hujan tiba. Atas dasar itu, muncul gagasan awal

dari pegiat UKM untuk meminta tambahan bantuan ke pihak VICO Indonesia dalam bentuk pemasangan kanopi di depan Gedung UKM Center. Tujuannya agar usaha makanan cepat saji yang diujakan beberapa pegiat UKM dapat berjalan dengan semakin lancar.

Mendengar ajuan tersebut, VICO Indonesia akhirnya mengabulkan ajuan tersebut walaupun tak melalui musrenbang karena anggaran untuk program tersebut tidak terlalu besar. Setelahnya, program tersebut pun berjalan dengan cepat dan wujud Penambahan Fasilitas Gedung UKM Center tersebut telah terpasang dan sudah bisa dinikmati sejak tahun 2016 silam. Rincian penambahan fasilitas antara lain: pemasangan *air conditioner* (AC), pengadaan kanopi, pengadaan paving blok, hingga pemasangan instalasi air dan listrik.

Selama resmi beroperasi sampai sekarang pun, Gedung UKM Center masih rutin diisi masyarakat pelaku UKM untuk menjajakan dagangannya baik produk olahan semacam oleh-oleh ataupun makanan cepat saji. Aktivitas di lokasi itu masih terus berjalan sampai sekarang dan berfungsi seperti niat awal berdirinya gedung tersebut, yakni sebagai sarana untuk mengumpulkan para pelaku UKM dalam satu titik.

Namun, satu masalah terbesar yang masih dirasakan hingga kini ialah mekanisme pemasaran yang hanya terbatas di Kecamatan Muara Jawa saja. Ditambah dengan beberapa banyak pekerja perusahaan yang tergolong sebagai pendatang dari luar Kaltim. Sehingga saat terjadi PHK atau kontrak kerjanya tak diperpanjang, mereka akan memilih kembali ke daerah asal mereka masing-masing.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. VICO Indonesia telah melaksanakan Program Pengembangan Tanaman Karet di Kelurahan Muara Jawa Ilir pada tahun 2014. Program tersebut diberikan atas ajuan yang diusulkan oleh pihak Kelompok Tani Gunung Pelita. Bentuk bantuan dari program ini bersifat pemberian bantuan barang secara langsung seperti pengadaan bibit karet (sebanyak 2.500 bibit), obat rumput (25 liter), dan mesin semprot (5 unit). Namun patut disayangkan, pasca pemberian bantuan, komunikasi antara pihak VICO Indonesia dan masyarakat penerima bantuan justru tak ada lagi terjalin.
2. VICO Indonesia juga telah melaksanakan Program Pelatihan Menjahit di Kelurahan Muara Jawa Ilir pada tahun 2015. Program tersebut diberikan atas ajuan ibu-ibu di kelurahan tersebut. Program ini bersifat pelatihan yang intensif diberikan sebanyak 30 kali pertemuan dalam kurun waktu dua bulan dan kebutuhan-kebutuhan menjahit lainnya. Namun juga sama seperti di atas, tindak lanjut dan komunikasi yang minim pasca pemberian bantuan membuat program ini kini idtak ada *follow up*-nya sama sekali. Bahkan, pemberian tiga mesin jahit dan satu mesin obras kini terbengkalai

karena tidak ada kejelasan terkait siapa yang berhak mengurus alat tersebut.

3. VICO Indonesia pun telah melaksanakan Program Penambahan Fasilitas di Gedung UKM Center di Kelurahan Muara Jawa Ulu pada tahun 2016. Sama seperti dua program di atas, program ini juga diberikan dengan sistem ajuan dari masyarakat atau *bottom up*. Bantuan yang diberikan ialah pengadaan instalasi listrik, PDAM, hingga peningkatan sarana-prasarana di halaman depan gedung yang difungsikan sebagai lapak untuk menjual berbagai makanan cepat saji. Program ini patut diapresiasi karena sebagai bentuk *follow up* dari program sebelumnya—pembangunan gedung UKM Center tahun 2015.

Saran

1. Membangun Komunikasi

Masalah yang didapat penulis saat penelitian ialah tak ada lagi komunikasi lanjutan antara VICO Indonesia ke Kelompok Tani Gunung Pelita pasca pemberian bantuan bibit karet. Saran agar komunikasi tak berhenti saat pemberian bantuan saja, karena komunikasi yang telah dibangun secara intens akan bermuara pada terbentuknya sinergisitas antar kedua belah pihak dan pemberdayaan masyarakat yang berjalan secara berkelanjutan.

2. Kolaborasi *Bottom Up-Top Down*

Di samping masyarakat juga memikirkan pola bantuan yang akan diminta, pihak VICO Indonesia juga sebaiknya membuat *grand design* khusus di program CSR Bidang Peningkatan Kemampuan Lokal agar bantuan semisal Pengembangan Tanaman Karet bagi Kelompok Tani Gunung Pelita (Dan penerima bantuan program CSR lainnya) terus dilakukan *follow up* secara konkret. Tujuannya jelas, agar masyarakat bisa menikmati hakikat kemandirian ekonomi dalam arti yang sebenarnya.

3. Pentingnya *Follow Up*

Tidak adanya *follow up* pasca pelatihan menjahit membuat hampir semua ibu-ibu yang mendapat pelatihan, saat ini tak lagi mengaplikasikan ilmunya untuk meningkatkan taraf ekonomi. Jika ada *follow up* lanjutan pasca program CSR, tentu lebih mudah menstimulasi dan penampungan aspirasi masyarakat yang mendapat pelatihan tersebut.

4. Pembentukan Kelompok Menjahit

Perlu dibuat sebuah kelompok khusus yang berisi para alumnus pelatihan menjahit. Tujuannya agar bisa mengkoordinir para ibu-ibu yang saat itu sudah ikut pelatihan menjahit. Dalam kelompok itu nantinya dibuatkan struktur pengurus, dan karena ada mesin jahit dan obras yang saat ini terbengkalai, maka kelompok ini dapat melakukan musyawarah

terkait lokasi paling pas untuk meletakkan mesin tersebut agar bisa digunakan para anggota kelompok secara bersama-sama.

5. Evaluasi Terhadap Program-program CSR

Meski “Pengembangan Fasilitas Gedung UKM Center” adalah bantuan yang sifatnya *follow up*—ini sudah sangat bagus, namun tetap harus ada upaya evaluasi pasca program tersebut selesai digulirkan. Evaluasi program CSR wajib dilakukan secara menyeluruh agar kekurangan dalam berbagai perencanaan bisa diperbaiki. Dan jika sudah baik, evaluasi berfungsi untuk membuat perencanaan program CSR jadi semakin baik.

6. Satu Masalah Klasik: Pemasaran

Ini masalah yang sampai saat ini dialami para pegiat UKM di Kecamatan Muara Jawa. Perlu ada bantuan—minimal ide konkret—dari pihak VICO Indonesia dan Pemerintah Kecamatan Muara Jawa untuk membantu upaya pemasaran produk dari para pegiat UKM. Karena seperti kebanyakan masyarakat pada umumnya, banyak yang kurang paham terkait mekanisme pemasaran yang baik dan efektif. Sulit bagi masyarakat yang “tidak terlalu paham” untuk “paham dengan sendirinya” tanpa adanya “stimulan” dari pihak perusahaan ataupun pemerintah.

Daftar Pustaka

- VICO Indonesia. (2014). *Together In Achieving The Good Goal, Laporan Kegiatan Program Pengembangan Masyarakat dan Hubungan Masyarakat 2014*. Balikpapan.
- VICO Indonesia. (2015). *Together In Achieving A Better Future, Laporan Kegiatan Program Pengembangan Masyarakat dan Hubungan Masyarakat 2015*. Balikpapan.
- VICO Indonesia. (2016). *Together In Achieving A Better Future, Laporan Kegiatan Program Pengembangan Masyarakat dan Hubungan Masyarakat 2016*. Balikpapan.
- Kurnia Syah Putra, Dedi. (2015). *Komunikasi CSR Politik: Membangun Reputasi, Etika, dan Estetika PR Politik*. Jakarta: Kencana.
- Hadi, Nor. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibisono, Yusuf. (2007). *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik: Fascho Publishing.
- Rahman, Reza. (2009). *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*. Jakarta: Buku Kita.
- Sugiyono. (2006). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Anwas, Oos M. (2013). *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.

- Moleong. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widodo, Joko. (2010) *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Miles, Mattew B dan A Michael Huberman. (2007). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Dokumen-dokumen

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.